

## Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi

I Gede Sujana

Universitas Dwijendra

[dalungsujana@gmail.com](mailto:dalungsujana@gmail.com)

Sutrisno

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[sutrisno.afiq@gmail.com](mailto:sutrisno.afiq@gmail.com)

Rudi Ana Pali

Universitas Dwijendra

[rudianapali@gmail.com](mailto:rudianapali@gmail.com)

### Abstrak

Demokrasi dan hak asasi manusia yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan mencerminkan kehendak masyarakat agar demokrasi dan hak asasi manusia bisa diwujudkan dalam kehidupan yang damai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara demokrasi dengan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari berbagai bahan bacaan, baik buku maupun jurnal-jurnal online. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam dan dideskripsikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hubungan hak asasi manusia dengan demokrasi, yaitu hak asasi manusia merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Hak asasi manusia tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter (tidak demokratis), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi hak asasi manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia bergantung pada kualitas demokrasi sebuah negara, jika demokrasi suatu negara maju, maka maju pula pelaksanaan hak asasi manusia di negara tersebut. Dalam tataran empiris hubungan antara demokrasi dengan hak asasi manusia dapat dicermati melalui bagaimana praktek penyelenggaraan negara oleh suatu rezim.

**Kata Kunci :** Korelasi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia

### I. PENDAHULUAN

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang akhir-akhir ini semakin masif digunjingkan, sehingga dapat dikatakan sebagai cerminan kehendak masyarakat agar demokrasi dan HAM bisa diwujudkan. Di sepanjang masa, persoalan demokrasi dan HAM selalu menjadi lahan subur bagi ilmuwan politik yang berminat mengetahui

lebih dalam berkaitan dengan konsep atau jenis pemerintahan yang dipandang baik (Santika, 2021). Dari cikal bakalnya di Yunani Kuno sampai dengan terjadinya arus deras gelombang demokratisasi ketiga seperti yang dikonstruksikan oleh Huntington, kedua konsep di atas terus menjadi sorotan utama.

Terlebih banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh para demokratisator di berbagai belahan dunia, seperti Eropa, Amerika Latin, bahkan di Asia yang mencoba untuk menjungkirkan rezim otoriter yang realitasnya sangat tidak demokratis dan menindas pelaksanaan HAM.

Untuk memahami lebih komperhensif terkait hubungan demokrasi dengan HAM, maka definisi menjadi sebuah keharusan untuk disampaikan disini. adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis “*droits de l’homme*” , dalam bahasa Inggris “*human rights*” , dan dalam bahasa Arab “*huquq al- insan*”. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara (Purana etc, 2023).

Oleh karena itu, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang bersifat universal, kodrati, dan universal. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar (*basic rights*) yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional dan internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam sebuah negara demokrasi (Sujana & Mustika, 2023).

Karenanya perlu dilakukan penelitian yang mendalam berkaitan antara hubungan HAM dengan demokrasi. Meskipun demokrasi bukanlah istilah baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena mulai dari pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan Kota Yunani, terutama di Athena. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Demos*” dan “*Kratos*”. *Demos* bermakna rakyat atau khalayak, sementara *Kratos* bermakna pemerintahan. Secara harfiah demokrasi berarti ‘pemerintahan oleh rakyat’. Lawan dari kata demokrasi adalah otokrasi, yang diartikan bahwa ‘pemerintahan dipegang dan dikuasai oleh seorang diktaktor’.

Dari istilah yang kedua ini kemudian muncul sebutan ‘penguasa yang otoriter’ atau ‘pemerintahan atau kekuasaan yang berpusat pada seseorang’. Sementara itu dalam kamus, demokrasi didefinisikan sebagai ‘pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas’. Pada definisi yang demikian tampak cerminan dari adanya konsep kedaulatan rakyat (*sovereignty of people*).

Haruslah dipahami, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan politik yang mengijinkan dan memberikan hak, serta kebebasan yang bertanggungjawab kepada warga negaranya untuk berpendapat, termasuk turut serta dalam pengambilan keputusan jalannya pemerintahan.

Banyak yang meyakini, bahwa HAM dan demokrasi memiliki hubungan yang saling berkaitan. Oleh karenanya menjadi menarik untuk mengupas lebih tuntas hubungan antara HAM dan Demokrasi. Bagaimana sebenarnya hubungan dua konsep tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat (Kapoh *et al.*, 2023). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian membenarkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian menggunakan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang untuk menghasilkan data deskripsi dan interpretasi makna yang lebih luas dan mendalam.

Penelitian ini adalah penelitian HAM dengan menetapkan kajian pada pemahaman

terhadap nilai dan wacana HAM yang berkembang. Dalam konteks ini, wacana literasi HAM menjadi unit analisisnya. Penelitian ini menitikberatkan analisis hubungan HAM dan Demokrasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari berbagai bahan bacaan baik buku maupun jurnal-jurnal online. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam dan dideskripsikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai demokrasi, tidaklah bisa mengabaikan hal penting yang bernama HAM. Menurut Gaffar (1999), pemenuhan HAM merupakan salah satu indikator penting dalam tatanan empiris demokrasi. Bahkan, PBB menyatakan bahwa HAM hanya dapat dilindungi secara efektif di negara demokratis. Melihat keterkaitan yang ada, lalu bagaimanakah sebenarnya hubungan antara kedua hal tersebut?

Hal yang menarik dari hubungan antara HAM dengan demokrasi, bahwa jenis demokrasi yang berbeda disuatu negara akan menghasilkan tingkat pemenuhan atau perlindungan HAM yang berbeda pula (Winaya *et al.*, 2023). HAM merupakan salah

satu syarat untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri melalui pemilihan umum. Demokrasi juga menghargai hak-hak sipil dan politik rakyat, seperti hak untuk menyampaikan pendapatnya, berpartisipasi dalam organisasi sosial, mengkritik pemerintah, dan lain-lain.

Antara HAM dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter (tidak demokratis), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.

Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, karena HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang benar-benar menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya (Purana & Sunariyanti, 2022). “Jika diumpamakan, demokrasi dan HAM itu ibarat dua sisi mata uang yang sama, tidak bisa hanya satu sisi yang maju, tetapi keduanya saling beriringan dan saling melengkapi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan HAM bergantung pada

kualitas demokrasi sebuah negara, jika demokrasi suatu negara maju maka maju pula pelaksanaan HAM di negara tersebut (Tuhuteru etc, 2023).

HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis (Kartika & Putra, 2023). Sementara itu, pemerintahan yang demokratis akan menjadi wahana bagi tegaknya HAM dalam kehidupan semua warga negara. Dengan kata lain, diterimanya demokrasi secara luas jelas memperkuat upaya penghormatan terhadap HAM. Demokrasi juga memastikan, bahwa negara dan masyarakat menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi yang baik, hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang ada. Pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak tersebut serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Hubungan demokrasi dan HAM sudah dinyatakan dalam banyak kesepakatan seperti *Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, Solidarity Rights*, dan berbagai macam konvensi tentang hak asasi manusia.

HAM pada dasarnya bersifat universal, namun penerapannya mengalami proses

kontekstualisasi. Jangankan HAM, agama yang bersifat universal itu, ketika diterapkan pada suatu ruang dan waktu, dia mengalami proses pribumisasi atau sesuai dengan konteksnya (Sudiarta & Uma, 2023). Selain itu, sejumlah HAM tidak bisa dipisahkan. Harus dilakukan serentak, walaupun ada yang berpandangan bahwa dalam praktik, itu harus ada yang diprioritaskan. Ini bisa diperdebatkan. Demokrasi itu bisa terwujud kalau ada hak asasi manusia, terutama *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dan, karena hak dan kebebasan politik itu baru pada tahap potensial, karena dalam praktik belum tentu semua bisa menggunakan itu, maka *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights* juga menjadi penting untuk mewujudkan demokrasi. Dua jenis HAM itu merupakan prasyarat untuk wujudnya demokrasi (Santika & Lero, 2023).

Dalam tataran empiris hubungan antara demokrasi dengan HAM dapat dicermati melalui bagaimana praktek penyelenggaraan negara oleh suatu rezim. Beberapa indikator penjelasa adanya penegakan HAM dalam suatu rezim adalah sebagai berikut 1) adanya jaminan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, berserikat serta berkumpul; 2) bebas menentukan pilihan dalam pemilu tanpa ada paksaan siapapun; 3) adanya kebebasan pers; 4) kebebasan beragama; 5) kebebasan untuk

hidup; serta 6) adanya partisipasi politik. Setelah menelaah lebih jauh, dapatla dilihat, bahwa demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terikat dan tak terpisahkan. Pemenuhan HAM ternyata terlihat lebih menonjol di negara demokrasi yang meskipun dalam praktiknya negara-negara melindungi HAM dengan cara yang berbeda sesuai dengan demokrasi yang dianut. Demikian pula dengan demokrasi; demokrasi kemudian tidak bisa didefinisikan tanpa adanya HAM. Namun, meskipun kedua hal tersebut berkaitan, pemenuhan HAM yang diberikan tidak selalu hadir secara sempurna. Oleh karena itu, diperlukan peran banyak pihak untuk menciptakan negara demokrasi yang memenuhi dan menjaga HAM dengan maksimal (Mahendra & Roni, 2023).

Demokrasi dan hak asasi manusia saling melengkapi. Hak asasi manusia memastikan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang setara dan dihormati tanpa diskriminasi apa pun. Dalam sistem demokrasi, keputusan diambil berdasarkan kepentingan umum dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Demokrasi juga menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam proses politik (Santika & Konda, 2023). Namun demokrasi yang buruk atau tidak sehat dapat mengancam hak asasi



manusia. Pemimpin yang terpilih dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting adalah memastikan, bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan sehat, serta hak asasi manusia dihormati dan dilindungi (Sutika, 2023).

Selanjutnya yang perlu menjadi pembahasan secara mendalam adalah bagaimana hubungan HAM dengan demokrasi di Indonesia? Dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti, bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebaliknya. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan

konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan, bahwa korelasi HAM dengan demokrasi, yaitu HAM merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. antara HAM dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter (tidak demokratis), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Pelaksanaan HAM bergantung pada kualitas demokrasi sebuah negara, jika demokrasi suatu negara maju, maka maju pula pelaksanaan HAM di negara tersebut. Dalam tataran empiris hubungan antara demokrasi dengan HAM dapat dicermati melalui bagaimana praktek penyelenggaraan negara oleh suatu rezim. Beberapa indikator penjelasan adanya penegakan HAM dalam suatu rezim adalah sebagai berikut: 1) adanya jaminan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, berserikat serta berkumpul; 2) bebas menentukan pilihan dalam pemilu tanpa ada paksaan siapapun; 3) adanya kebebasan pers; 4) kebebasan beragama; 5) kebebasan untuk hidup; serta 6) adanya partisipasi politik.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kapoh, R. J., Pattiasina, P. J., Rutumalessy, M., Wariunsora, M., Tabelessy, N., & Santika, I. G. N. (2023). Analyzing the Teacher's Central Role in Effort to Realize Quality Character Education. *Journal of Education Research*, 4(2), 452-459.
- Kartika, I. M., & Putra, I. P. A. (2023, March). The practice of independent learning and its implications for the learning proces in public senior high school in Denpasar City. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 423-432).
- Mahendra, P. R. A., & Roni, A. R. B. (2023, March). DEMOCRATIC EDUCATION BASED ON ICT IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 649-655).
- Purana, I. M., & Sanjaya, I. M. (2023, March). NATIONAL ENTITIES AND NATIONAL MENTALITY URGENCY IN THE FACE OF GLOBALIZATION. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 199-210).
- Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023, March). The Theory Of Pancasila Elements As A Reorientation Of Character Education In Indonesia In Building The Spirit Of Nationalism. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 79-85).
- Santika, I. W. E., & Lero, D. P. (2023, March). STRENGTHENING THE VALUES OF TRI KAYA PARISUDHA IN SHAPING THE PROFILE OF PANCASILA STUDENTS. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 588-593).
- Sudiarta, I. N., & Uma, Y. M. (2023, March). The Role Of The Adat Chairman In Preserving The Culture Lahi Galang Village, Wanukaka District, West Sumba District. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 375-384).
- Sujana, I. G., & Mustika, I. P. B. (2023, March). THE IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT FROM THE PERSPECTIVE ON HUMAN RIGHTS. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 679-686).
- Sutika, I. M., Winaya, I. M. A., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2023, March). THE EFFECTIVENESS OF NON-VERBAL COMMUNICATION IN IMPROVING STUDENTS' LEARNING MOTIVATION AT SMP DWIJENDRA DENPASAR. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 663-670).
- Tuhuteru, L., Budianingsih, Y., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Memang, E. B. W. (2023). Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity. *Widya Accarya*, 14(1), 66-72.
- Winaya, I. M. A., Ledes, E., & Sutika, I. M. (2023, March). THE IMPLEMENTATION OF ATTENTION RELEVANCE CONFIDENCE SATISFACTION (ARCS) LEARNING MODEL THROUGH THE USE OF PICTURE MEDIA TO IMPROVE
-



FIFTH GRADE ELEMENTARY  
STUDENTS' READING INTEREST AT  
SD N 21 DANGIN PURI DENPASAR.

*In Proceedings of The International  
Conference on Multi-Disciplines  
Approaches for The Sustainable  
Development (pp. 365-374).*